

**PERSEPSI BIROKRASI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN  
TERHADAP TRANSPARANSI ANGGARAN  
DI PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Oleh : Sapto Setyo Nugroho (14010113130113)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) / Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABTRACT***

*One of the policies in the concept of good governance relating to the prevention of corruption is the Budget Transparency. Batang Regency Government is one example of the local governments that implement this policy. It is important to know the perceptions of bureaucracy and stakeholders on the implementation of budget transparency in Batang Regency Government, perception is analyzed so that it can be evaluated for various parties, it was then the purpose of this study.*

*With the quantitative approach which uses a questionnaire as a research tool, the research data is extracted from the sample of respondents consisting of 37 Public, 31 Private and 23 Society. Then the data was analyzed using SPSS Program. The results showed an average knowledge of respondents to access information and documents was less out due to involvement in the management of budget that is less active. With the average knowledge of the respondents believe is very important and a good rate on the implementation aspect of budget transparency. It thus also affect the respondents who expressed very agree an very support of all the implications and the attitude of budget transparency in Batang Regency Government.*

*Keywords : Perception, Budget Transparency, Batang Regency Government*

## A. PENDAHULUAN

Perjalanan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) mengalami dinamika perkembangan yang cukup kompleks. Dalam pelaksanaannya, tentunya hal tersebut mempunyai dampak positif seperti kreativitas tata kelola pemerintahan yang berdasarkan karakteristik daerah, serta mempunyai dampak negatif seperti munculnya upaya sistematis yang membuka peluang terjadinya korupsi.

Salah satu prinsip terpenting dalam *good governance* dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi tersebut adalah transparansi. Transparansi sebagai upaya pencegahan korupsi mutlak dilaksanakan pada salah satu celah peluang terjadinya korupsi yaitu modus penggunaan anggaran, yang dalam konteks Pemerintah Daerah adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>1</sup> Transparansi selama ini menjadi momok yang menyebabkan korupsi terus merajalela terlebih lagi dalam kaitannya dengan kegiatan anggaran. Masalah klasiknya adalah prinsip-prinsip transparansi hanya sebatas retorika atau slogan, namun dalam kondisi realita pelaksanaannya, transparansi hanya dijadikan *accessoriess* (pelengkap) dalam setiap pengambilan kebijakan serta dalam proses anggaran yang menjadi lahan luas untuk berpeluang melakukan korupsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Labolo, Muhadam. 2015. *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 47.

<sup>2</sup> Tahir, Arifin. 2004. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : CV Alfabet, hlm. 114.

Beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan transparansi anggaran dalam upaya pencegahan korupsi tersebut. Contoh saja adalah Kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang melalui kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan *good governance*, inovasi-inovasi tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Batang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak dan meraih berbagai penghargaan dalam bidang reformasi birokrasi, pelayanan publik dan transparansi anggaran. Salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Batang dalam hal terkait transparansi anggaran adalah mengadakan Festival Anggaran.

Dalam upaya mewujudkan transparansi anggaran di Pemerintah Kabupaten Batang tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran birokrasi dan pemangku kepentingan yang dalam konsep *good governance* tersebut meliputi unsur publik (PNS), unsur swasta (pengusaha) dan unsur masyarakat (kelompok masyarakat) karena pada dasarnya menurut UNDP dalam Sedarmayanti bahwa keberhasilan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* ditentukan oleh kualitas hubungan antar pemangku kepentingannya.<sup>3</sup>

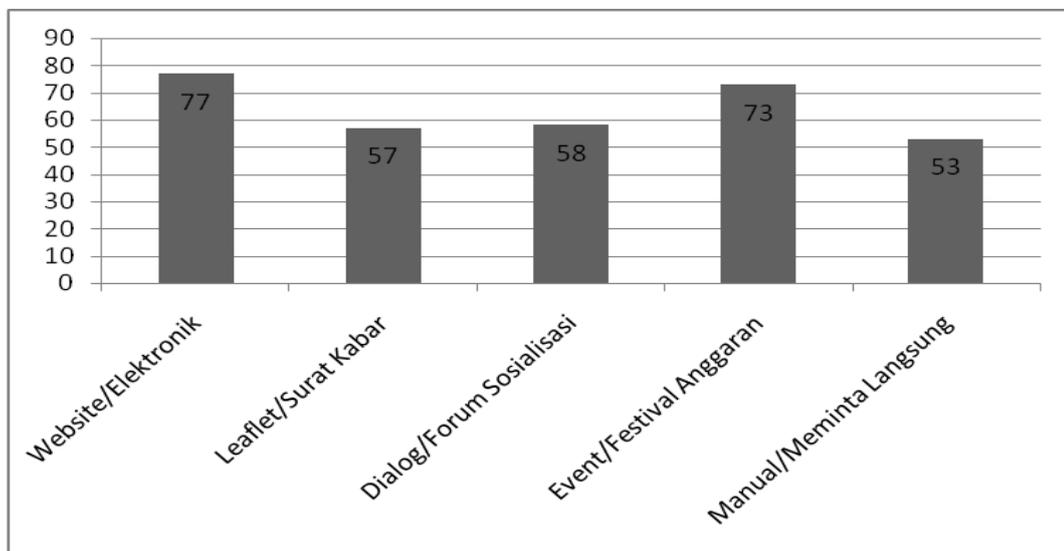
---

<sup>3</sup> Sedarmayanti. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung : Mandar Maju, hlm 2.

## B. PEMBAHASAN

### B.1 Pengetahuan Responden terhadap Akses Informasi yang disediakan

Gambar B.1



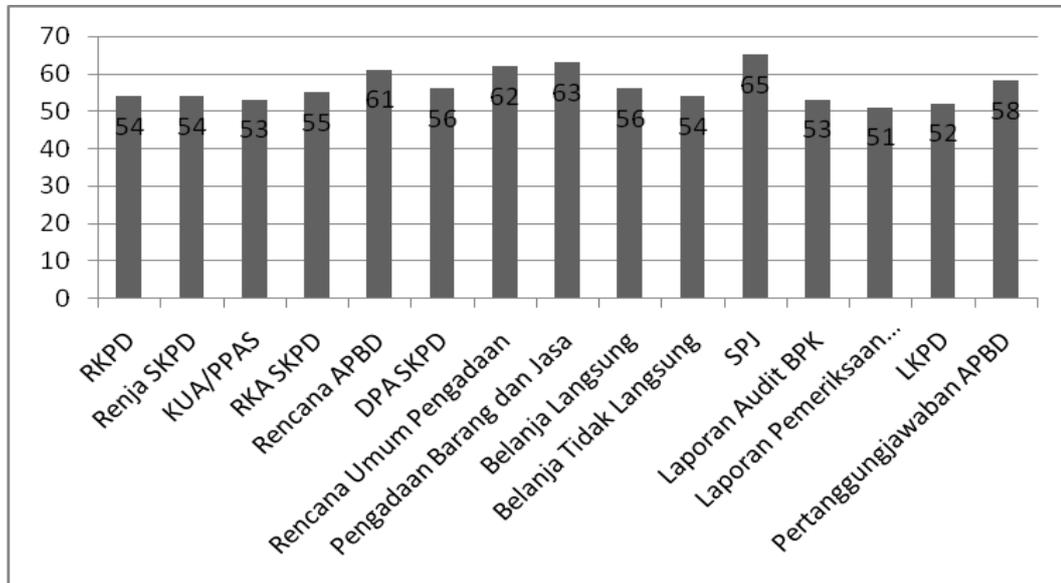
Sumber : Olah Data Primer, SPSS, 2017

Berdasarkan gambar di atas, data menunjukkan bahwa rata-rata hasil skor adalah 41-60 yang berarti responden kurang tahu terhadap akses informasi yang disediakan, kecuali pada akses website/elektronik dan akses event/festival anggaran yang masing-masing meraih skor 77 dan 73 yang berarti Tahu.

Rata-rata skor yang relatif rendah tersebut dapat dipengaruhi oleh keterlibatan responden dalam pengelolaan anggaran yang rata-rata adalah kurang aktif. Skor yang berbeda pada akses website/elektronik dan akses event/festival anggaran disebabkan karena beberapa responden menyebutkan bahwa regulasi yang menuntut untuk menerapkan e-government sehingga mau tidak mau responden pernah menggunakan akses website/elektronik dalam pengelolaan anggaran, kemudian karena kebaruan dan kepopulerannya responden juga tahu terhadap akses event/festival anggaran walaupun tidak pernah berpartisipasi secara langsung.

## B.2 Pengetahuan Responden terhadap Dokumen Pengelolaan Anggaran

Gambar B.2



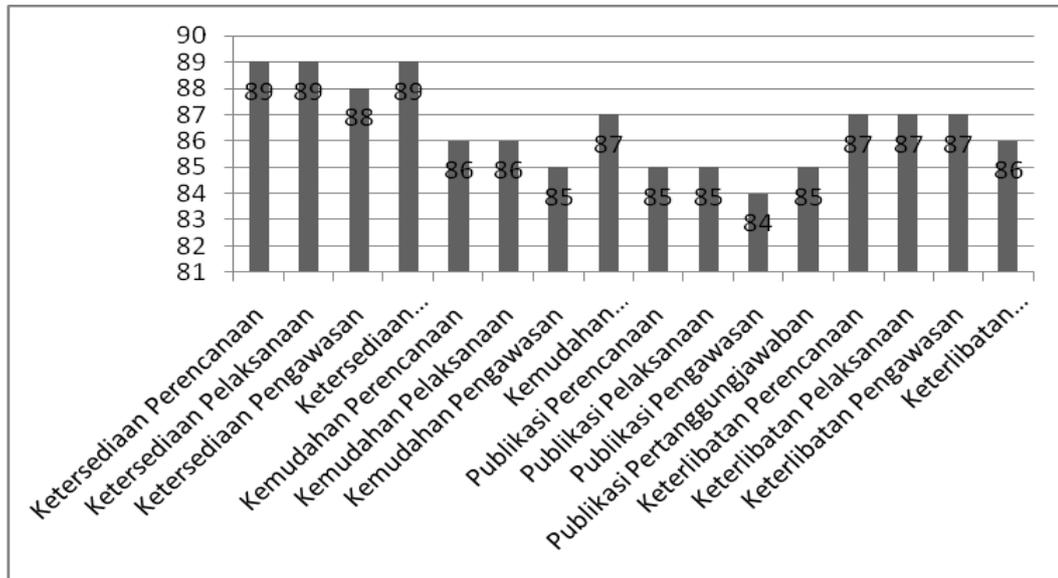
Sumber : Olah Data Primer, SPSS, 2017

Berdasarkan gambar di atas, data menunjukkan bahwa rata-rata hasil skor adalah 41-60 yang berarti responden kurang tahu terhadap dokumen dalam pengelolaan anggaran, kecuali pada dokumen Rencana APBD, Rencana Umum Pengadaan, Pengadaan Barang dan Jasa dan SPJ yang memperoleh masing-masing skor adalah 61, 62, 63 dan 65 atau berarti Tahu.

Rata-rata skor yang relatif rendah tersebut dapat dipengaruhi juga oleh keterlibatan responden dalam pengelolaan anggaran yang rata-rata adalah kurang aktif. Skor yang berbeda pada beberapa dokumen disebabkan karena beberapa responden menyebutkan bahwa responden sering terlibat dengan beberapa dokumen tertentu tersebut, selain itu, beberapa dokumen tersebut juga dirasakan responden adalah dokumen yang umum dan dapat diakses dengan mudah di beberapa akses informasi yang disediakan.

### B.3 Keyakinan Responden terhadap pentingnya aspek-aspek dalam Transparansi Anggaran

Gambar B.3



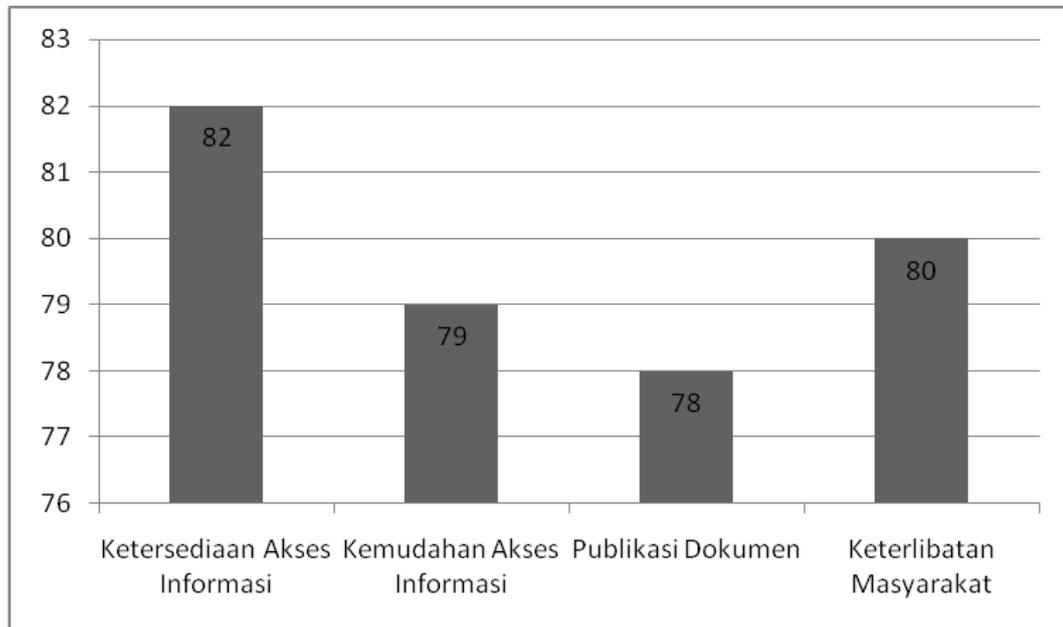
Sumber : Olah Data Primer, SPSS, 2017

Berdasarkan gambar di atas, data menunjukkan bahwa rata-rata hasil skor adalah 81-100 yang berarti responden meyakini sangat penting terhadap aspek-aspek dalam transparansi anggaran. Seluruh skor di atas 81 dimana rata-rata skor tertinggi adalah pada aspek ketersediaan akses informasi dan rata-rata skor terendah adalah pada aspek publikasi dokumen.

Rata-rata skor yang relatif tinggi tersebut dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengetahuan responden terhadap akses informasi dan dokumen, walaupun rata-rata adalah kurang tahu namun responden tetap menganggap itu sebuah hal yang Sangat Penting. Beberapa responden menyebutkan bahwa aspek-aspek tersebut merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang yang mana hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh responden tersebut.

#### B.4 Penilaian Responden terhadap pelaksanaan aspek-aspek dalam Transparansi Anggaran

Gambar B.4



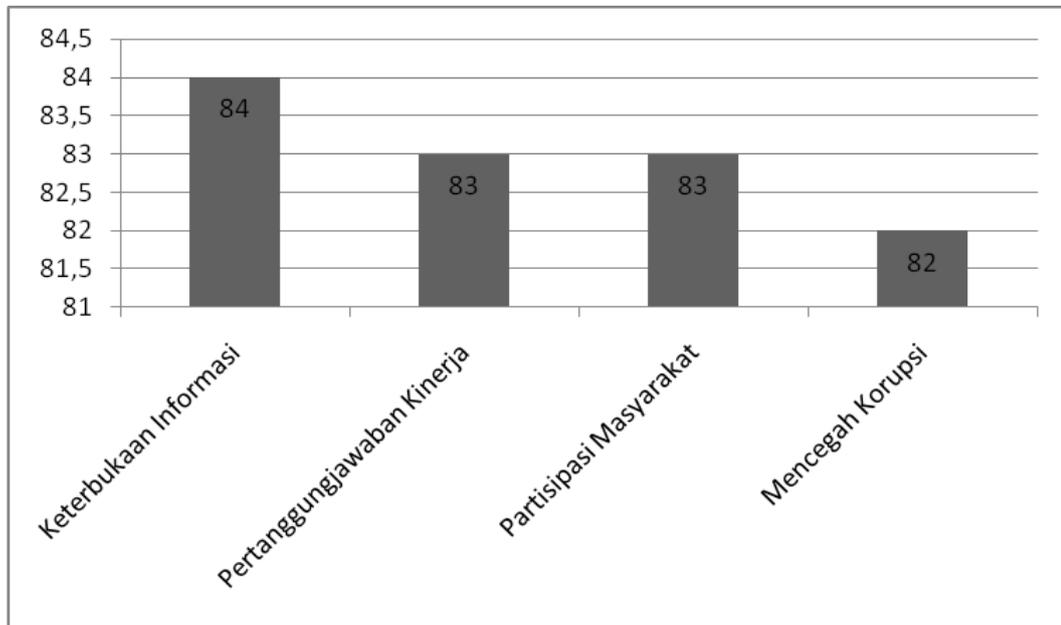
Sumber : Olah Data Primer, SPSS, 2017

Berdasarkan gambar di atas, data menunjukkan bahwa rata-rata hasil skor adalah 61-80 yang berarti responden menilai Baik terhadap pelaksanaan aspek-aspek dalam transparansi anggaran, kecuali pada aspek ketersediaan akses informasi yang memperoleh skor 82 atau berarti Sangat Baik.

Rata-rata skor yang belum sangat tinggi tersebut dipengaruhi juga oleh pengetahuan responden terhadap akses informasi dan dokumen yang walaupun rata-rata adalah kurang tahu namun beberapa responden menyebutkan bahwa sudah ada semangat yang baru dalam transparansi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Batang sehingga responden mengapresiasi semangat tersebut, tetapi responden juga merasa bahwa apa yang dilaksanakan tersebut belum maksimal, entah itu kelemahan dari Pemerintah, atau kelemahan dari responden itu sendiri karena kurang tahunya pengetahuan terhadap akses informasi dan dokumen

## B.5 Kesetujuan Responden terhadap implikasi-implikasi dalam Transparansi Anggaran

Gambar B.5



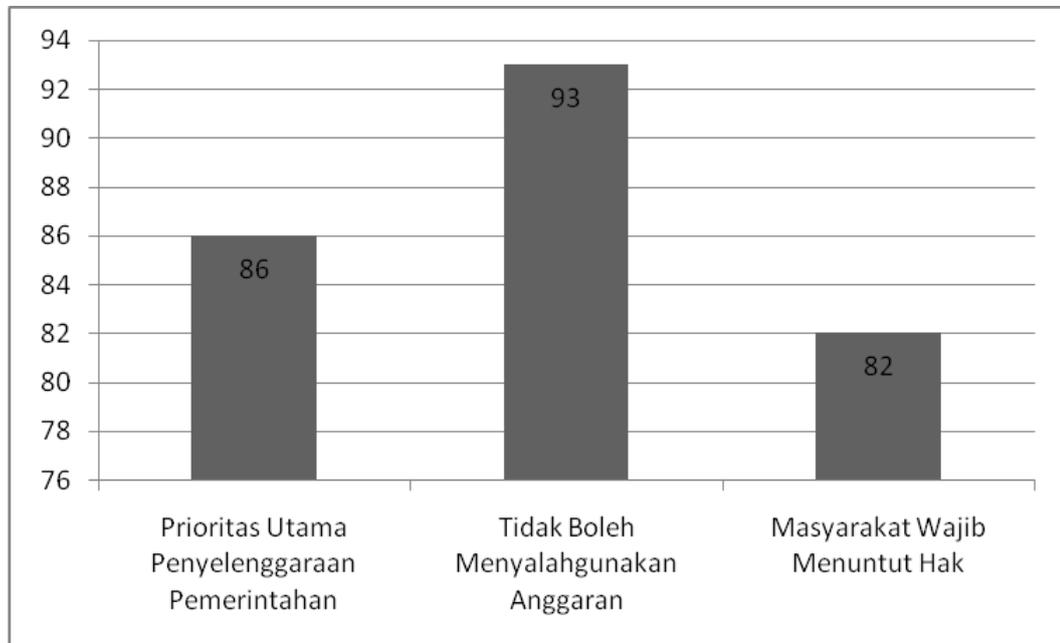
Sumber : Olah Data Primer, SPSS, 2017

Berdasarkan gambar di atas, data menunjukkan bahwa rata-rata hasil skor adalah 81-100 yang berarti responden menyatakan sangat setuju terhadap implikasi-implikasi dalam transparansi anggaran. Seluruh skor adalah di atas 81 dimana skor tertinggi adalah pada implikasi keterbukaan informasi dan skor terendah adalah pada implikasi mencegah korupsi.

Rata-rata skor relatif tinggi namun belum maksimal tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan responden terhadap akses informasi dan dokumen serta keyakinan dan penilaian responden terhadap pelaksanaan aspek-aspek transparansi anggaran yang walaupun kurang tahu namun responden tetap merasa sangat penting dan baik sehingga hal tersebut dapat menjadi harapan dalam mewujudkan implikasi-implikasi transparansi anggaran tersebut.

## B.6 Sikap Responden terhadap adanya Transparansi Anggaran

Gambar B.6



Sumber : Olah Data Primer, SPSS, 2017

Berdasarkan gambar di atas, data menunjukkan bahwa rata-rata hasil skor adalah 81-100 yang berarti responden menyatakan sangat dukung terhadap sikap-sikap transparansi anggaran. Seluruh skor adalah diatas 81 dimana skor tertinggi adalah pada sikap tidak boleh menyalahgunakan anggaran dan skor terendah adalah pada sikap masyarakat wajib menuntut hak

Rata-rata skor relatif tinggi namun belum maksimal seluruhnya tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan responden terhadap akses informasi dan dokumen serta keyakinan dan penilaian responden terhadap pelaksanaan aspek-aspek transparansi anggaran yang walaupun kurang tahu namun responden tetap merasa sangat penting dan baik sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan utama responden dalam menentukan sikap adanya transparansi anggaran di Pemerintah Kabupaten Batang.

### **C. PENUTUP**

Rata-rata pengetahuan responden terhadap akses informasi yang disediakan adalah kurang tahu, sedangkan rata-rata pengetahuan responden terhadap dokumen dalam pengelolaan anggaran adalah juga kurang tahu. Dengan pengetahuan responden terhadap akses informasi dan dokumen dalam pengelolaan anggaran yang rata-rata adalah kurang aktif, namun rata-rata responden tetap meyakini sangat penting terhadap aspek-aspek dalam transparansi anggaran dan juga rata-rata responden juga menilai Baik terhadap pelaksanaan aspek-aspek dalam transparansi anggaran. Dengan rata-rata keyakinan dan penilaian responden terhadap pelaksanaan aspek-aspek transparansi anggaran adalah sangat penting dan baik, rata-rata responden menyatakan sangat setuju terhadap implikasi-implikasi dalam transparansi anggaran dan rata-rata responden juga menyatakan sangat mendukung terhadap sikap-sikap adanya transparansi anggaran.

### **REFERENSI**

- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Paris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan, Ardeno. 2015. *Korupsi di Indonesia : Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern*. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam. 2015. *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Tahir, Arifin. 2004. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : CV Alfabet.